

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang sedang diterjang oleh dunia secara global tidak terkecuali Indonesia telah memberikan akibat yang signifikan terhadap berbagai macam aspek kehidupan manusia. Pada aspek perekonomian, pandemi turut memberikan pengaruh pada ekonomi yang kian lemah baik di nasional ataupun daerah, menurunnya jumlah pajak yang diterima, dan ekonomi yang melambat. Di sektor perbankan sendiri, pandemi turut mempengaruhi kinerja keuangan bank akibat permasalahan dan risiko-risiko yang timbul akibat pandemi. Salah satu masalah dan risiko yang paling dirasakan ialah peningkatan risiko kredit akibat kemampuan beli warga yang kian turun mengakibatkan peningkatan rasio NPL yang artinya turut mengurangi kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Dampak pandemi ini turut dirasakan oleh semua lembaga perbankan di Indonesia termasuk bank umum serta BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Namun diantara kedua bank tersebut, BPR mempunyai tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena menurut Yuniarti (2011) permodalan, sumber daya, serta sistem pengelolaan BPR belum sebaik bank umum, sehingga sangat berisiko saat menghadapi situasi krisis seperti pandemi ini. Oleh karena itu, BPR harus mendapatkan perhatian khusus agar mampu mempertahankan fungsi dan kinerjanya.

Secara umum, keadaan BPR selama pandemi Covid-19 masih tergolong baik, yang ditandai dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit serta fungsi intermediasi yang berjalan baik walaupun masih lebih lambat dibandingkan sebelum pandemi. Namun, BPR masih harus menghadapi risiko kenaikan NPL dan rentabilitas yang menurun. Adapun, secara ringkas, perkembangan kinerja BPR bisa diperhatikan berikut ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Kinerja Keuangan BPR Periode 2019-2021

| RASIO | TW IV 2019 | TW IV 2020 | YW IV 2021 |
|-------|------------|------------|------------|
| KPMM | 28.88 | 29.89 | 32.15 |
| ROA | 2.31 | 1.87 | 1.78 |
| BOPO | 81.5 | 84.24 | 83.61 |
| NPL | 5.22 | 5.33 | 3.37 |
| LDR | 79.09 | 75.44 | 73.67 |
| CR | 17.08 | 18.67 | 14.05 |

(Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan IV 2019-2021)

Data pada Tabel 1.1 memperlihatkan rasio ROA BPR selama tiga tahun yang terus menurun yang artinya kemampuan BPR dalam menghasilkan profit menurun, begitu juga kenaikan rasio BOPO memperlihatkan penurunan efisiensi biaya BPR dalam rangka menghasilkan pendapatan. Selain itu, dampak pandemi yang paling dirasakan oleh perbankan di Indonesia ialah perlambatan hingga penurunan aktiva dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ikut berdampak pada tidak optimalnya kredit yang diberikan dan rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang naik. Jumlah penerimaan kredit yang menurun berdampak pada penurunan kemampuan BPR dalam memperoleh keuntungan sebelum pajak juga (Supeno & Ida, 2020). Secara umum, berbagai dampak dan risiko yang ditimbulkan oleh pandemi ini dirasakan oleh semua BPR termasuk di dalamnya yang milik swasta ataupun pemerintah daerah. Periode 2019-2021 ialah momen awal hingga puncak pandemi melanda Indonesia yang tentunya memberikan dampak yang signifikan

terutama pada sektor perbankan. Oleh karena itu, periode 2019-2021 ialah saat yang sangat tepat untuk melakukan perbandingan agar diketahui seberapa tangguh BPR dalam menghadapi krisis. Hal ini menjadi alasan penggunaan periode 2019-2021 sebagai periode penelitian untuk memfokuskan momen pandemi sebagai aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan BPR, sehingga dapat dilihat perkembangan BPR dari sebelum hingga saat pandemi terjadi secara keseluruhan yang bisa dilihat melalui rata-rata kinerja keuangan BPR selama periode tersebut.

Pada UU Nomor 10 Tahun 1998 didefinisikan bahwasanya BPR ialah bank yang melakukan aktivitas upaya yang tradisional dan/atau juga sesuai aturan syariah yang mana dalam aktivitasnya tak memberi pelayanan dalam arus dalam pembayaran. Berdasarkan kepemilikannya, BPR dibedakan menjadi yang milik daerah yang biasanya milik Kabupaten ataupun Provinsi, dan juga kepemilikan swasta. BPR Milik Pemerintah Daerah ialah BPR yang sebagian besar atau keseluruhan sahamnya ialah milik pemerintah daerah, sedangkan BPR Milik Swasta ialah BPR yang sebagian atau keseluruhan sahamnya milik pihak swasta. Pada dasarnya kedua jenis BPR tersebut melaksanakan kegiatan yang sama, namun BPR Milik Pemerintah Daerah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan BPR jenis lainnya karena selain menjalankan kegiatan BPR secara umum, juga berfungsi sebagai agen pendorong pembangunan daerah lewat cara membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penyaluran dana untuk program pemerintah daerah.

Menurut Rositasari (2016) bank yang dimiliki oleh pemerintah mempunyai sumber pendanaan yang lebih besar daripada bank yang menjadi milik swasta karena pemerintah dapat memberikan subsidi kepada bank tersebut. Selain itu,

sifat usaha bank milik pemerintah lebih megutamakan kepentingan publik daripada kepentingan ekonomi belaka. Hal ini terbukti pada penyertaan modal BPR milik Pemerintah Daerah bisa bersumber dari hibah, penyertaan modal dari pemerintah, dan sumber modal yang lain. Sedangkan pada bank milik swasta, penyertaan modal hanya berasal dari pemilik dan pemegang saham. Selain itu, dari segi strategi perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK), bank milik pemerintah dapat memperoleh DPK dari nasabah juga dan suntikan dana oleh pemerintah. Berbeda dengan BPR Milik Swasta yang hanya mengandalkan dana masyarakat sebagai DPK baik dalam bentuk tabungan atau deposito.

Berdasarkan status dan kontrolnya, bank yang dimiliki oleh pemerintah bergerak dibawah kendali pemerintah sebagai pemegang saham utama, sedangkan bank milik swasta bergerak dibawah kendali sektor privat (Vaidya, n.d.). Hal ini berpotensi memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan BPR Milik Pemerintah Daerah yang status kontrolnya berada di tangan pemerintah sebagai pemegang saham utama dan sebagai pembuat kebijakan, dibandingkan dengan BPR Milik Swasta yang kinerja keuangannya murni hasil usaha dari pihak manajemen BPR tanpa ada campur tangan dari pihak lain (Afriyanto et al., 2016). Berdasarkan hal tersebut, maka ingin diketahui apakah perbedaan karakteristik tersebut turut menimbulkan perbedaan pula dalam kinerja keuangannya.

Bali ialah salah satu provinsi yang memiliki populasi BPR yang banyak dibandingkan daerah Indonesia lainnya selain pulau Jawa. Sesuai data per Januari tahun 2019, ada 136 BPR yang terdiri dari 133 BPR Milik Swasta dan 3 BPR Milik Pemerintah Daerah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Banyaknya jumlah BPR akan mendorong persaingan yang ketat antar BPR dalam menarik

nasabah, terlebih lagi di saat gempuran *fintech* dan persiangannya dengan bank umum. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, meningkatkan kinerja keuangan ialah sebuah keharusan agar tetap bertahan dalam industri perbankan di Indonesia. Namun data di lapangan memperlihatkan sebaliknya. Selama tahun 2019-2021 OJK telah mencabut izin usaha atau melikuidasi 3 BPR Milik Swasta di Bali yaitu PT BPR Calliste Bestari dan PT BPR Legian pada tahun 2019, dan PT BPR Sewu yang baru dilikuidasi pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan penurunan kinerja keuangan pada BPR Milik Swasta yang membuat kesehatan bank menurun dan berujung pada likuidasi.

Berbeda hal dengan BPR Milik Pemerintah Daerah, ada berbagai isu-isu yang berpotensi turut mempengaruhi kinerja keuangannya. Menurut Budiwiyo (2011) status kepemilikan oleh pemerintah dan penguasaan pemerintah terhadap perbankan memiliki pengaruh buruk terhadap kinerja perbankan. Adapun bentuk penguasaan pemerintah terhadap perbankan bisa berbentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk pemilihan komisaris dan jajaran direksi, perekrutan karyawan, pembelian barang dan jasa, dan pemberian kredit. Berbagai bentuk intervensi ini bisa merusak gaya kepemimpinan dan budaya kerja yang bisa mempengaruhi kinerja bank itu sendiri (Erlyna & Supatmi, 2013). Walaupun BPR milik swasta kalah unggul dengan Milik Pemerintah Daerah dari segi permodalan, namun kelebihan ini kadang tidak dibarengi dengan perbaikan manajemen sehingga kinerjanya belum tentu lebih baik dibandingkan dengan BPR Milik Swasta (Rositasari, 2016). Salah satu masalah yang dihadapi oleh BPR Milik Pemerintah Daerah di Bali pada masa pandemi ialah penurunan rentabilitas yang tercermin dari penurunan rasio ROA yang rata-ratanya selama periode 2019-2021

hanya sebesar 0,75% dan termasuk kategori tidak sehat sesuai dengan PBI Nomor 6/10/PBI/2004 karena rasio ROA kurang dari 0,765%. Walaupun demikian, eksistensi BPR Milik Pemerintah Daerah masih tetap bertahan tanpa ada yang dilikuidasi.

Berdasarkan isu-isu di atas dan oleh karena ada banyak pihak yang memerlukan informasi tentang kinerja keuangan BPR, maka setiap BPR wajib untuk menyiapkan pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan, dan selanjutnya, pihak-pihak seperti masyarakat dan pemegang saham akan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam membuat keputusan. Jika dikaitkan dengan *teori signaling* yang secara umum membahas tentang dorongan manajemen untuk memberikan sinyal atau isyarat dalam rangka mengurangi asimetri informasi, maka informasi mengenai kinerja keuangan dapat dijadikan sinyal, baik itu sinyal baik atau sinyal buruk bagi manajemen internal BPR kepada *stakeholder* agar tidak terjadi asimetri informasi, kemudian pihak-pihak tersebut bisa menyesuaikan tindakannya sesuai dengan pemahamannya terhadap informasi tersebut.

Kinerja keuangan dari setiap bank ialah cerminan kemampuan bank tersebut dalam mengalokasikan dan mengelola sumber dayanya (Wanma & Anggarini, 2019). Oleh karena itu, bagi pihak yang mempunyai kepentingan dengan pertumbuhan sebuah usaha sangatlah penting untuk tahu kondisi keuangan kelompok tersebut yang dapat diketahui dari laporan keuangannya. Dengan melaksanakan evaluasi pada performa keuangan, maka didapatkan informasi tentang gambaran secara umum dan baik buruknya perusahaan serta tingkat keberhasilan bank dalam mencapai tujuannya. Penilaian kinerja keuangan sering

dipraktikkan dengan adanya analisa pada rasio keuangan. Lewat rasio keuangan, bisa dilihat keadaan keuangan bank secara periodik. Selain itu, rasio keuangan bisa menjadi pengganti informasi yang lebih sederhana dibandingkan komponen-komponen laporan keuangan yang biasanya lebih terstruktur.

Di dalam Riset ini, rasio keuangan yang dipakai dalam penilaian performa keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2017 Tentang Transparansi Keadaan Keuangan BPR yang menetapkan jika rasio keuangan yang dipakai sebagai acuan evaluasi performa keuangan yang terdiri rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Non Performing Loans* (NPL), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Return On Asset* (ROA), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan *Cash Ratio* (CR). Alasan penggunaan ke-tujuh rasio keuangan tersebut karena mampu mewakili indikator penilaian kinerja keuangan bank meliputi aspek profitabilitas, kualitas aset, risiko likuiditas, efisiensi operasional, pertumbuhan, serta risiko modal menurut (Cornett et al., 2012). Adapun rasio-rasio ini dapat dilihat pada Laporan Publikasi Triwulanan BPR yang dapat diakses melalui situs www.ojk.co.id untuk tahun 2019-2021. Data pada Riset ini bersumber dari Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan karena laporan ini ialah satu-satunya yang resmi dipublikasikan dan bisa diakses oleh publik. Selain itu, tidak semua BPR mempublikasikan laporannya secara rutin di situs yang dimiliki oleh masing-masing BPR, sehingga laporan ini ialah satu-satunya sumber untuk melihat kinerja keuangan BPR. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sifatnya wajib dipublikasikan oleh BPR berupa Laporan Neraca atau Posisi Keuangan, Laporan Rugi Laba, Laporan Komitmen dan

Kontijensi, Laporan Kualitas Asset, dan Laporan Informasi Lainnya sesuai yang ada di POJK No.48/POJK.03/2017. Nantinya laporan ini akan dipublikasikan pada situs resmi OJK untuk bisa dilihat oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja keuangan yang telah dilaksanakan selama tiga bulan.

Cornett et al., (2012) menyatakan setidaknya ada lima indikator keuangan yang digunakan sebagai proksi kinerja keuangan bank meliputi profitabilitas, kualitas aset, risiko likuiditas, efisiensi operasional, serta risiko modal. Di dalam Riset ini penilaian kinerja keuangan didasarkan pada lima indikator tersebut yaitu rasio ROA yang mewakili aspek profitabilitas, BOPO mewakili aspek efisiensi operasional, CR dan LDR mewakili aspek risiko likuiditas, KPMM mewakili aspek risiko modal, serta rasio NPL dan PPAP mewakili aspek kualitas aset.

Rasio *Return on Asset* (ROA) memperlihatkan kekuatan organisasi dalam mendapatkan untung. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, (2021) kinerja keuangan BPR pada triwulan kedua tahun 2020 hingga 2021 terus menurun yang ditandai dengan penurunan ROA. Cornett et al., (2012) mengukur indikator profitabilitas dengan rasio ROA. Kian tinggi rasio ROA yang diraih maka kian besar juga laba yang diraih oleh bank serta memperlihatkan bahwa bank telah efisien dalam memakai aktivanya dalam rangka memperoleh keuntungan. Dalam kaitannya dengan kinerja keuangan, peningkatan ROA berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan karena *return* yang bisa dinikmati pemegang saham semakin tinggi pula (Rosada, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mointi (2019) hasilnya ada kinerja keuangan yang berbeda secara signifikan antara Bank yang dimiliki swasta dan pemerintah dari Rasio ROA. Dari segi rasio ROA, Bank

Pemerintah memperlihatkan kinerja yang lebih unggul daripada Bank Swasta (Wanma & Anggarini 2019). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Faroza & Susanti (2021) dan Tiarso & Idayati (2017) mendapatkan hasil sebaliknya, dimana tidak ada perbedaan antara rasio ROA Bank Milik Pemerintah dan rasio ROA Bank Milik Swasta.

Loan to Deposit Ratio (LDR) ialah bagian dari rasio likuiditas yang rumusnya ialah membandingkan kredit dengan dana dari orang ketiga. Sedangkan *Cash Ratio* (CR) ialah rasio yang dihitung dengan membandingkan total aset yang paling likuid dengan hutang lancar. Kedua rasio ini ada dalam rasio minimal yang harus dimuat dalam Laporan Publikasi Triwulanan BPR dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dari aspek likuiditas. Kian tinggi hasil rasio ini maka kian bagus juga tingkat likuiditas suatu bank, sehingga turut mempengaruhi kinerja keuangan bank dalam hal menjaga keadaan keuangannya tetap likuid. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyaningsih & Suwason (2020) dan Mointi (2019) memperlihatkan hasil bahwasanya terdapat performa keuangan yang berbeda signifikan antara LDR Bank kepemilikan pemerintah dan swasta. Hasil penelitian Prananta et al. (2019) memperlihatkan bahwa performa rasio LDR BPR Milik Pemerintah Daerah lebih unggul daripada kepemilikan swasta. Sedangkan penelitian dan Afriyanto et al. (2016) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan yang dimiliki pihak swasta ditinjau dari perbandingan LDR. Penelitian Afriyanto et al. (2016) memperlihatkan bahwasanya BPR yang dimiliki pemerintah dan swasta sama-sama dalam keadaan baik dan tidak ada perbedaan kinerja antara kedua jenis bank tersebut ditinjau dari rasio CR.

BOPO ialah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi BPR dalam melakukan aktivitas usahanya dengan membandingkan pengeluaran operasional dan pemasukan operasioanlanya. Semakin efisien bank dalam mengeluarkan biaya operasional, maka semakin baik kinerja keuangan yang dimilikinya. Selama pandemi efisiensi BPR terus menurun yang tercermin dari naiknya rasio BOPO (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Cornett et al., (2012) juga mengukur aspek efisiensi operasional dengan rasio BOPO. Kian besar rasio ini mengartikan bahwasanya kian besar juga biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan. Hasil penelitian Prananta et al. (2019) menyatakan bahwa hasil performa rasio BOPO BPR pemerintah lebih bagus dari milik swasta. Sesuai dengan penelitian Tiarso & Idayati (2017) dan Mointi (2019) hasilnya memperlihatkan bahwa ada performa keuangan yang berbeda signifikan antara Bank yang dimiliki swasta dengan pemerintah ditinjau dari rasio BOPO. Namun hasil yang sebaliknya memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan rasio BOPO pada kedua bank tersebut sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Afriyanto et al. (2016)

Dalam mengukur aspek risiko modal, Cornett et al., (2012) memakai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). KPMM atau disebut juga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ialah rasio yang bisa dicari dengan melakukan perbandingan antara jumlah ekuitas dengan asset tertimbang yang sesuai risiko (ATMR) untuk menghitung kepadanan ekuitas bank. Kian besar rasio ini memperlihatkan kian bagus mutu ekuitas suatu bank. Tidak hanya itu, CAR yang rasionya tinggi mempertunjukkan bahwasanya keyakinan warga yang tinggi juga pada bank tersebut, sehingga dapat menaikkan nilai saham bank tersebut. Hasil

penelitian Widiyaningsih & Suwasono (2020), Faroza & Susanti (2021), dan Tiarso & Idayati (2017) memperlihatkan rasio KPMM yang berbeda signifikan antara performa keuangan bank milik swasta dan pemerintah. Sedangkan sebaliknya, riset oleh Afriyanto et al. (2016) dan Prananta et al. (2019) hasilnya tidak ada yang berbeda antara BPR yang dimiliki swasta dan yang dimiliki pemerintah dilihat dari perbandingan KPMM.

Aspek kualitas aset di dalam Riset ini bisa diukur dengan rasio Penyisihan Penghapusan Aset produktif (PPAP) dan *Non Performing Loan* (NPL). PPAP ialah cadangan yang harus dibuat oleh bank dengan persentase tertentu dari saldo debit yang didasarkan pada pengelompokan mutu aset yang produktif yang dimiliki. Sedangkan Rasio NPL ialah rasio untuk mengukur tingkat kredit bermasalah dengan membuat perbandingan jumlah kredit yang mempunyai masalah dengan seluruh jumlah kredit yang tersedia pada BPR tersebut. Dampak pandemi yang paling dirasakan oleh perbankan di Indonesia ialah meningkatnya rasio *Non Performing Loan* (NPL) akibat perlambatan ekonomi yang turut mengurangi tingkat penerimaan kredit. (Cornett et al., 2012) mengukur aspek kualitas aset dengan rasio NPL dimana semakin tinggi rasio NPL, maka semakin tinggi pula kemungkinan bunga kredit yang menunggak dan bisa menurunkan keuntungan BPR. Penelitian Afriyanto et al., (2016) memperlihatkan bahwa BPR yang dimiliki pemerintah daerah dan swasta sama-sama dalam keadaan sehat dan tidak ada perbedaan anatar kinerja kedua jenis bank tersebut ditinjau dari rasio PPAP. Sedangkan berdasarkan penelitian oleh Prananta et al. (2019) terdapat hal yang berbeda yang signifikan dalam performa keuangan antara BPR yang dimiliki swasta dan pemerintah. Menurut penelitian Wanma & Anggarini (2019)

berdasarkan rasio NPL, Bank Swasta memperlihatkan kinerja yang lebih unggul dibandingkan Bank Pemerintah.. Namun riset yang dilaksanakan oleh Afriyanto et al. (2016) serta Tiarso & Idayati (2017) memperlihatkan luaran sebaliknya, yaitu tidak tersedia pembeda yang signifikan antara performa keuangan Bank yang dimiliki swasta dan pemerintah jika ditinjau dari rasio NPL.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti topik yang sama, seperti halnya penelitian yang dilaksanakan oleh (Afriyanto et al., 2016) yang membandingkan kinerja keuangan dengan rasio KPMM, PPAP, ROA, NPL, BOPO, LDR, dan CR, hasilnya ialah tidak ada perbedaan performa keuangan antara BPR yang dimiliki swasta dan pemerintah. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh (Prananta et al., 2019) hasilnya memperlihatkan tidak ada rasio keuangan yang berbeda antara BPR Milik Pemda dan BPR Milik Swasta ditinjau dari rasio CAR, LDR, KAP, BOPO, dan ROA. Sedangkan dari segi NPL ada perbedaan yang signifikan dimana lebih unggul BPR milik swasta dalam melakukan pengelolaan kredit yang bermasalah daripada BPR Milik Pemerintah. Hasil yang berbeda juga ada pada penelitian (Tiarso & Idayati, 2017) yang memperlihatkan bahwa dari rasio NPL, NPM dan ROA tidak ada perbedaan performa keuangan Bank yang dimiliki pemerintah dan yang dimiliki swasta yang signifikan, namun untuk CAR, BOPO dan LDR dinyatakan bahwasanya terdapat pembeda yang signifikan performa keuangan bank yang dimiliki swasta dan milik pemerintah.

Riset ini mengadopsi riset yang dilakukan oleh Afriyanto et al., (2016) yang berjudul “Kinerja Finansial Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Milik Swasta di Provinsi Riau”. Riset ini dilakukan dengan

membandingkan performa keuangan BPR yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dengan menggunakan rasio KPMM, PPAP, ROA, NPL, BOPO, LDR, dan CR luaran dari riset memperlihatkan bahwa tidak ada performa keuangan yang tidak sama dari BPR milik swasta dan yang dimiliki pemerintah dari tujuh rasio yang digunakan. Persamaan riset ini dengan kajian yang diacu ada pada rasio-rasio yang dipakai sebagai dasar untuk membandingkan performa finansial antara BPR yang dipunyai swasta dengan pemerintah. Sedangkan perbedaan kajian yang diacu dengan Riset ini terletak pada asal data penelitian yang dipakai menggunakan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang disediakan pada situs resmi milik OJK www.ojk.go.id serta tempat penelitian, karena sebelumnya masih tidak ada penelitian sejenis yang dilakukan di provinsi Bali.

Mengetahui kinerja BPR menjadi pertimbangan yang krusial bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan BPR seperti pemilik saham, nasabah, pegawai, pemerintah, dan masyarakat. Karena banyaknya pihak yang memiliki kepentingan dengan bank, maka menilai kinerja keuangan ialah suatu hal yang penting (Muchlish & Umardani, 2016). Berdasarkan hal itu, Riset ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari tahu apakah perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh BPR yang dipunyai swasta dan pemerintah menimbulkan perbedaan pula pada pencapaian kinerja keuangan mereka dengan membandingkan rasio-rasio keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian kinerja keuangan. Selain itu, Riset ini dilakukan bertepatan pada momen pandemi sebagai periode penelitian untuk melihat ketangguhan kedua BPR tersebut dalam menghadapi krisis sehingga hasil Riset ini bisa digunakan sebagai acuan pertimbangan dalam membuat putusan kepada beragam pihak yang mempunyai kepentingan dan bisa

mendapatkan manfaat yang optimal dari kedua jenis BPR tersebut. Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, sehingga penulis tertarik untuk membuat kajian yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BPR Milik Pemerintah Daerah Dengan BPR Swasta di Provinsi Bali Periode 2019-2021”

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, sehingga bisa ditelusuri beberapa permasalahan yang terjadi ialah.

1. Pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya kinerja perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2. Ada tiga BPR di Bali yang dilikuidasi selama pandemi yang mengindikasikan penurunan kinerja keuangan pada BPR Milik Swasta.
3. Ada penurunan kinerja keuangan BPR yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dilihat dari penurunan perbandingan ROA.
4. Perbedaan orientasi bisnis, permodalan, status kontrol, serta perolehan dana pihak ketiga antara BPR yang dimiliki pemerintah daerah dengan swasta menghasilkan perbedaan strategi pula dalam memenangkan persaingan.

1.3. Pembatasan Masalah

Penilaian kinerja keuangan bank dapat menggunakan berbagai jenis rasio. Di Riset ini, pengukuran kinerja keuangan baik untuk BPR yang dimiliki swasta dengan Pemerintah Daerah dibatasi dengan menggunakan rasio-rasio tertentu seperti KPMM, NPL, PPAP, BOPO, ROA, LDR, CR. Adapun data laporan keuangan yang digunakan ialah Laporan Triwulan yang dirilis di situs resmi OJK

pada tahun 2019-2021, serta BPR yang akan diteliti ialah BPR-BPR yang berkedudukan di Bali diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasar uraian sebelumnya, rumusan problematika yang akan dikaji yakni.

1. Adakah yang berbeda performa keuangan antara BPR yang dinaungi pemerintah daerah dengan swasta ditinjau dari rasio KPMM?
2. Adakah yang berbeda performa keuangan dari BPR yang dipunyai Pemda dengan swasta ditinjau dari rasio PPAP?
3. Adakah pembeda performa finansial antara BPR yang dibawah Pemda dengan swasta ditinjau dari rasio NPL?
4. Adakah yang berbeda performa keuangan dari BPR yang dinaungi Pemda dengan swasta ditinjau dari rasio ROA?
5. Adakah yang berbeda performa finansial dari BPR yang dinaungi Pemda dengan yang swasta ditinjau dari rasio BOPO?
6. Adakah pembeda performa finansial antara BPR dinaungi Pemda dengan swasta ditinjau dari rasio LDR?
7. Adakah yang berbeda performa finansial dari BPR yang dinaungi Pemda dengan swasta ditinjau dari rasio CR?

1.5. Tujuan Penelitian

Dari paparan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan kajian ialah:

1. Untuk tahu adanya pembeda performa keuangan dari BPR yang dipunyai Pemda dengan yang swasta ditinjau dari rasio KPMM.

2. Untuk tahu terkait perbedaan dari performa finansial mengetahui antara BPR yang dimiliki pemerintah daerah dengan swasta ditinjau dari rasio PPAP.
3. Untuk tahu adanya performa finansial yang beda antara BPR yang dimiliki pemerintah daerah dengan swasta ditinjau dari rasio NPL.
4. Untuk tahu adanya performa finansial yang berbeda berbeda antara BPR dinaungi pemda dengan swasta ditinjau dari rasio ROA.
5. Untuk tahu adanya performa finansial yang tidak sama antara BPR yang dinaungi Pemda dan swasta ditinjau dari rasio BOPO.
6. Untuk tahu terkait dengan performa finansial yang berbeda antara BPR dari Pemda dengan yang swasta ditinjau dari rasio LDR.
7. Untuk tahu tentang berbedanya performa finansial dari BPR dinaungi Pemda dengan yang swasta ditinjau dari rasio CR.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

(1) Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, luaran Riset ini mampu bermanfaat dan memberi sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teori dipelajari di berbagai mata kuliah pada bangku perkuliahan, serta menambah wawasan tentang model pemberian nilai performa finansial BPR.

(2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari Riset ini diharapkan akan digunakan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, meliputi:

a. Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Luaran riset ini mampu memberi wawasan dan pendapat bagi BPR tentang kinerja keuangannya yang bisa dipakai landasan dalam membuat putusan pihak internal bank guna menaikkan kinerja keuangannya.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Luaran dari Riset ini dirancang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam penentuan kebijakan dalam rangka menaikkan performa finansial BPR.

c. Bagi Masyarakat

Melalui hasil Riset ini, diharapkan bisa sebagai dasar dan sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja finansial antara BPR yang dimiliki swasta dan pemerintah untuk pertimbangan dalam menentukan pilihan di antara kedua jenis BPR tersebut.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Luaran dari Riset ini mampu dipakai sumber informasi tambahan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji topik yang sama untuk mengembangkan riset sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dijadikan sumber informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti

topik yang sama untuk mengembangkan riset sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

